

ABSTRAK

ANALISIS PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Oleh : Elok Aqidah

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Saat ini kebanyakan masyarakat masih kurang paham akan pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis. Mereka masih banyak yang melakukan dengan perjanjian secara lisan. Walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata, namun perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat di bandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Permasalahan tentang wakaf yang terjadi di Indonesia ini sudah di atur dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah Bagaimana keabsahan perjanjian serah terima tanah wakaf yang dilakukan secara lisan dan Apa akibat hukum apabila terjadi pembatalan ikrar wakaf oleh ahli waris wakif terhadap perjanjian serah terima tanah wakaf yang dilakukan secara lisan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Keabsahan perjanjian serah terima tanah wakaf yang dilakukan secara lisan hal ini menunjukkan bahwa perjanjian bisa dilakukan secara lisan dinyatakan sah karena kesepakatan secara lisan termasuk serah terima wakaf dan menurut agama perjanjian secara lisan juga sah. Akibat hukum apabila terjadi pembatalan ikrar wakaf oleh ahli waris wakif. Kasus tanah wakaf dengan perjanjian serah terima tanah wakaf yang dilakukan secara lisan sudah jelas tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum jadi harus di legalkan secara hukum, Ahli waris wakif tidak akan mendapatkan akibat secara hukum jika memang ahli waris memiliki bukti nyata berupa surat atau akta kepemilikan tanah.

Indonesia merupakan negara hukum yang semuanya diatur dengan hukum apalagi wakaf yang telah dinaungi dengan payung hukum yang legal yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun upaya dalam mengatasi pembatalan ikrar wakaf oleh ahli waris wakif terhadap perjanjian serah terima tanah wakaf yang dilakukan secara lisan. Peran pemerintah sangat penting dalam proses pencatatan tanah wakaf dengan cara sosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Kata Kunci : Wakaf, Pencatatan Tanah, Perjanjian.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF WAQF LAND REGISTRATION
ACCORDING TO LAW NUMBER 41 OF 2004 CONCERNING
WAQF**

By : Elok Aqidah
Principal Advisers : Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.
Companion Guide : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Currently, most people still do not understand the importance of entering into a written agreement. Many of them still do it with a verbal agreement. Although oral agreements are not prohibited by the Civil Code, oral agreements do not have a strong legal force compared to written agreements. The issue of waqf that occurred in Indonesia has been regulated in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf.

The formulation of the problem in writing this thesis is how the validity of the waqf land handover agreement is carried out orally and what are the legal consequences if there is a cancellation of the waqf pledge by the wakif heirs to the waqf land handover agreement which is carried out orally.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

The validity of the agreement on the handover of waqf land which is carried out orally shows that the agreement can be made orally is declared valid because the verbal agreement includes the handover of the waqf and according to religion the verbal agreement is also valid. The legal consequences if there is a cancellation of the waqf pledge by the wakif heirs. The case of waqf land with an agreement to hand over waqf land which is carried out verbally clearly has no legal force in the eyes of the Indonesian state, because Indonesia is a state of law so it must be legalized legally, the heirs of the wakif will not get legal consequences if they are the heirs. have tangible evidence in the form of a letter or deed of land ownership.

Indonesia is a legal state where everything is regulated by law, especially waqf that has been shaded by a legal legal umbrella, namely Law Number 41 of 2004. The efforts to overcome the cancellation of waqf pledges by wakif heirs to the handover agreement of waqf land are carried out orally. The role of the government is very important in the process of recording waqf land by way of socialization so that the public can know the importance of written agreements so that problems do not occur in the future.

Keywords: Waqf, Land Registry, Agreement.